

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kurikulum menjadi perkakas penting dalam pelaksanaan hingga hasil siklus pendidikan. Sebagaimana tertuang pada UU No. 20 Tahun 2003 berkaitan Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Butir 19 yang mengartikan kurikulum ialah sejumlah rencana sampai langkah yang terkait dengan target, konten, dan materi, hingga metode pembelajaran yang digunakan sebagai panduan untuk memberlakukan semua aturan pendidikan dalam melakukan pelatihan pembelajaran untuk mencapai tujuan instruksional tertentu.¹ Perencanaan kurikulum di Indonesia sejak otonomi hingga beberapa waktu yang lalu telah mengalami banyak perubahan. Banyak perubahan terjadi sesuai kebutuhan, sehingga mempengaruhi koherensi pendidikan sejak saat ini. Maka, perubahan kurikulum dari waktu ke waktu sangat mempengaruhi pendidikan di Indonesia.²

Perubahan merupakan sesuatu yang lumrah dalam setiap kehidupan. Allah Swt berfirman dalam al-Qur'an surat ar-Ra'du ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

¹ Kemendikbud Ristek, *Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran* (Jakarta: Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, 2022), h. 10.

² Tono Supriatna Nugraha, "Kurikulum Merdeka untuk Pemulihan Krisis Pembelajaran," *Jurnal UPI* 19, no. 2 (2022): h. 252.

Dalam ayat ini menggarisbawahi penekanan untuk mengalami perubahan yang diinginkan Allah Swt, seseorang harus menginisiasi perubahan dalam dirinya dahulu, tanpa adanya usaha maka tidak terbayangkan suatu perubahan akan terjadi.³ Mengingat hal ini, sebenarnya tidak diharapkan bahwa otoritas publik pada umumnya melakukan perubahan terhadap pengaturan sistem pendidikan, termasuk perubahan terhadap rencana pendidikan. Hal ini karena pemerintah memerlukan pendidikan yang lebih baik, karena tanpa perubahan, pendidikan yang ada tidak akan mengalami perkembangan dan peningkatan yang ideal.

Pada akhir tahun 2019, munculnya pandemi virus corona (Covid-19) mengubah, memulihkan, dan memicu kondisi darurat dalam pendidikan di Indonesia. Krisis pandemi Covid-19 secara fundamental mempengaruhi perubahan baru dalam sistem pendidikan Indonesia.⁴ Dalam situasi ini, pendekatan pengajaran juga mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan sebagai tanggapan terhadap pandemi Covid-19. Untuk lebih memantapkan pencapaian tujuan pembelajaran yang sesungguhnya, Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memulai penataan ulang sistem pendidikan, terutama melalui program Kurikulum Merdeka pada tanggal 11 Februari 2022.⁵ Program ini dianggap mampu menciptakan iklim pembelajaran yang dinamis dan efektif.

Segep keinginan terkait Kurikulum Merdeka, dengan semua pemikiran dan batasannya dapat menghasilkan pengalaman pembelajaran optimal.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Vol 6)* (Jakarta: Lantera Hati, 2017), h. 568.

⁴ Irinna Aulia Nafrin dan Hudaidah Hudaidah, "Perkembangan pendidikan Indonesia di masa pandemi Covid-19," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 2 (2021): h. 456–57, <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.324>.

⁵ Andang, *Kebijakan Kurikulum* (Yogyakarta: UMM Press, 2014), h. 44.

Selanjutnya, keadaan yang ada dijadikan sebagai tahapan perbaikan pengajaran mulai dari kerangka pembelajaran, kemampuan dan kapabilitas guru, kerjasama dengan inovasi, teknik pembelajaran, dan bahkan prosedur pengajaran serta pembelajaran yang kompleks.⁶ Penyelenggaraan program Kurikulum Merdeka ini beraskan pada Kemendikbud Ristek No. 56 Tahun 2022 tentang Aturan Penyelenggaraan Program Pendidikan Pemulihan Pembelajaran (Kurikulum Merdeka) sebagai suplemen dari Kurikulum 2013.⁷ Nadiem Makarim dengan tegas mengutarakan gagasan peluang realisasi yang digagasnya merupakan sebuah karya untuk mengakui peluang pemikiran. Karena itu, program ini memberikan keinginan yang besar terhadap berbagai lembaga pendidikan untuk menyelidiki dan membina mutu pendidikan di lembaganya.

Gagasan Kurikulum Merdekaini sama seperti gagasan yang dikemukakan oleh Paulo Freire dalam Akhmad Muhaimin Azzet, bahwa dengan adaptasi khusus yang dilakukan untuk memberikan kesempatan penilaian dan pemikiran dalam pengalaman yang berkembang.⁸ Saat ini pengajaran harus mampu membawa orang menuju kebebasan fisik dan mendalam. Hal ini juga didukung oleh Ki Hadjar Dewantara dalam jurnal Amanda Pratiwi dan Anindya Fajarini, bahwa gagasan pembinaan bertumpu pada pedoman otonomi, yang mengandung arti bahwa masyarakat diberikan kemerdekaan dari Tuhan untuk menyesuaikan hidupnya

⁶ Asfiati, *Visualisasi Dan Virtualisasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Versi Program Merdeka Belajar Dalam Tiga Era: Revolusi Industri 5.0, Era Pandemic Covid-19 Dan Era New Normal*. (Bandung: Kencana, 2020), h. 24.

⁷ Kemendikbud Ristek, *Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran*.

⁸ Akhmad Muhaimin Azzet, *Pendidikan yang Membebaskan* (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2017), h. 12–13.

dengan norma-norma yang berlaku dalam pandangan masyarakat.⁹ Maka untuk itu, Kurikulum Merdeka membawa makna yang sangat dalam pada kebebasan dalam konteks kegiatan belajar mengajar.

Program Kurikulum Merdeka dianggap sebagai kemajuan yang substansial dalam bidang pendidikan, mengingat bahwa sistem pendidikan kita sebelumnya lebih cenderung menekankan penilaian berbasis angka.¹⁰ Kurikulum Merdeka memperlihatkan beberapa perubahan yang mencolok bila dibandingkan dengan Kurikulum 2013. Salah satu perubahan yang signifikan adalah transformasi Ujian Nasional (UN) menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, sementara Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) menjadi tanggung jawab setiap sekolah. Guru juga diberikan keleluasaan dalam merancang modul ajar, dan terjadi penyesuaian dalam Peraturan Penerimaan Siswa Baru (PPSB).¹¹ Dengan demikian, kebijakan Kurikulum Merdeka bertujuan memwadahi pendidikan yang ideal memberikan kesempatan bagi kemerdekaan berpikir.

Sehubungan dengan SK (Surat Keputusan) Kemendikbud No. 5719/B2 GT.03.15/2021, khusus di Kota Banjarmasin terdapat 42 sekolah yang memenuhi syarat sebagai sekolah penggerak, salah satunya SMA Negeri 11 Banjarmasin.¹² Sebagaimana diungkapkan dalam wawancara awal dengan waka kurikulum di

⁹ Amanda Pratiwi dan Anindya Fajarini, "Konsep Pendidikan Humanis Perspektif Ki Hadjar Dewantara," *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan* 6, no. 2 (10 November 2021): h. 7–8, <https://doi.org/10.47435/jpdk.v6i2.651>.

¹⁰ Abdul Ghani Jamora Nasution, "Diskursus Merdeka Belajar Perspektif Pendidikan Humanisme," *Jurnal Ihya al-Arabiyah: Pendidikan Bahasa dan Sastra* 6, no. 1 (2020): h. 6, <https://doi.org/10.30821/ihya.v6i1.7921>.

¹¹ Purwandi Sutanto, *Buku Saku Merdeka Belajar: Prinsip dan Implementasi pada Pendidikan SMA* (Jakarta: Direktorat SMA-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), h. 12–19.

¹² Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, "Pengumuman Hasil Seleksi Tahap ke-1 Sekolah Penggerak di Kota Banjarmasin," 02 November 2021.

SMA Negeri 11 Banjarmasin, bahwa Kurikulum Merdeka mulai diterapkan pada tanggal 18 Juli pada tahun ajaran 2022/2023. Pelaksanaannya hanya berlaku untuk siswa kelas X di sekolah tersebut.¹³ Oleh karenanya, pendekatan pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka haruslah disesuaikan dengan prinsip dasar kurikulumnya, yang menitikberatkan pada kebutuhan dan kemampuan siswa.

Menurut hasil wawancara awal peneliti dengan guru PAI di SMA Negeri 11 Banjarmasin, terungkap bahwa tantangan utama yang menghambat implementasi Kurikulum Merdeka adalah kesiapan para guru sebagai fondasi kemajuan dalam menjalankan program tersebut.¹⁴ Betapapun baiknya rencana pendidikan itu direncanakan, bilamana para guru tidak siap melaksanakannya, maka rencana pendidikan itu akan sia-sia belaka. Semua guru diharapkan untuk memahami sepenuhnya program Kurikulum Merdeka, karena program ini memiliki dampak yang signifikan pada pembelajaran siswa di sekolah. Terutama dalam konteks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang harus memperhitungkan berbagai aspek, seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan itu, diperlukan pemahaman yang mendalam agar penerapan program ini dapat dilakukan secara efektif dan produktif.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh peneliti, maka pelaksanaan program Kurikulum Merdeka patut diperhatikan dan dinilai untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaannya di sekolah. Untuk itu, peneliti memfokuskan penelitian ini pada penerapan program Kurikulum Merdeka serta faktor pendukung

¹³ Muhammad Qurtobi (Waka Kurikulum), Wawancara Kurikulum Merdeka, 23 November 2022, SMA Negeri 11 Banjarmasin.

¹⁴ Muhammad Amin (Guru Pendidikan Agama Islam), Wawancara Kurikulum Merdeka, 23 November 2022, SMA Negeri 11 Banjarmasin.

dan penghambatnya guna mengetahui lebih lanjut mengenai “Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 11 Banjarmasin”.

B. Definisi Operasional

1. Implementasi

Secara etimologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi kelima, kata implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.¹⁵ Menurut Robert E. Quinn dan John Rohrbaugh, implementasi adalah tahap dalam perubahan organisasi di mana keputusan dan program-program yang telah dirancang mulai dijalankan dalam konteks praktis, seringkali melibatkan transformasi budaya dan struktural.¹⁶ Jadi, yang dimaksud implementasi di sini adalah penerapan program Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas X SMAN 11 Banjarmasin.

2. Kurikulum Merdeka

Secara etimologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi kelima, kata kurikulum diartikan sebagai rencana pembelajaran.¹⁷ Menurut Abdul Ghani, Kurikulum Merdeka ialah sebuah paradigma baru dalam pendidikan yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran, memberikan kebebasan untuk menentukan jalannya

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, 2016), h. 548.

¹⁶ Robert E. Quinn dan John Rohrbaugh, “A Spatial Model of Effectiveness Criteria: Towards a Competing Values Approach to Organizational Analysis,” *Management Science* 29, no. 3 (Maret 1983): h. 367, <https://doi.org/10.1287/mnsc.29.3.363>.

¹⁷ Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 783.

pembelajaran, serta mendorong kreativitas, inovasi, dan pemberdayaan siswa.¹⁸ Jadi, yang dimaksud Kurikulum Merdeka di sini adalah bagian dari Kurikulum Merdeka Fase E pada tingkat SMA.

3. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Secara etimologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi kelima, kata pembelajaran dapat diartikan sebagai proses atau metode.¹⁹ Menurut M. Quraish Shihab, pembelajaran pendidikan agama Islam sebagai proses pendidikan yang bertujuan untuk membimbing individu dalam memahami ajaran Islam, menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan mengembangkan kesadaran spiritual yang mendalam.²⁰ Jadi, yang dimaksud pembelajaran pendidikan agama Islam di sini adalah proses pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.

C. Fokus Penelitian

1. Penerapan Kurikulum Merdekadalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 11 Banjarmasin.
2. Faktor pendukung dan penghambat penerapan Kurikulum Merdekadalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 11 Banjarmasin.

¹⁸ Nasution, "Diskursus Merdeka Belajar Perspektif Pendidikan Humanisme," h. 15.

¹⁹ Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 802.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2013), h. 25.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan penerapan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 11 Banjarmasin.
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat penerapan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 11 Banjarmasin.

E. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini menjadi inovasi baru yang bertujuan untuk memperkaya pemahaman ilmiah tentang pelaksanaan Kurikulum Merdeka dalam beragam proses pembelajaran.

2. Secara Praktis

- a. Bagi guru, penelitian ini dimaksudkan sebagai sumbangan untuk memperkaya pemikiran dan pengetahuan serta meningkatkan mutu dan *volume* dalam pelaksanaan program Kurikulum Merdeka, terutama dalam proses pembelajaran yang terlibat di dalamnya.
- b. Bagi siswa, penelitian ini terkait dengan upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan siswa dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya selama proses pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka.
- c. Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini sebagai alat pemicu laju kreativitas sumber daya manusia, terutama mereka yang beraktivitas di lembaga pendidikan sehingga mampu memotivasi lembaga pendidikan

untuk mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan Kurikulum Merdeka.

- d. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini bisa digunakan sebagai panduan dan sumber informasi untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan Kurikulum Merdeka.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dari Kasmawati, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan guru terhadap penerapan konsep merdeka belajar. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak guru menghadapi kesulitan dan perubahan budaya dalam menerapkan Kurikulum Merdeka.²¹ Meskipun secara umum sejalan dengan penelitian peneliti yang menganalisis Kurikulum Merdeka, namun penekanan utama peneliti adalah pada penerapan Kurikulum Merdekadalam pembelajaran pendidikan agama Islam hingga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan, penelitian ini hanya mengungkap penerapan Kurikulum Merdekasecara umum dalam setiap mata pelajaran.
2. Penelitian dari Siti Nur Afifah, yaitu penelitian ini bertujuan sebagai bentuk identifikasi tantangan yang dihadapi guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Hasilnya menunjukkan bahwa guru PAI masih mengadopsi model pembelajaran Kurikulum 2013 dan menggabungkannya dengan Kurikulum Merdeka. Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman guru PAI tentang

²¹ Kasmawati, Persepsi Guru dalam Konsep Pendidikan (Studi pada Penerapan Merdeka Belajar di SMA Negeri 5 Takalar). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhamadiyah Makassar, 2022, h. 79-81.

diferensiasi pembelajaran dan kesulitan dalam menerapkannya.²² Meskipun ada kesamaan dengan penelitian peneliti yang menganalisis Kurikulum Merdeka. Namun, penelitian ini lebih menyoroti problematika Kurikulum Merdeka. Sementara itu, penelitian peneliti lebih memfokuskan pada penerapan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Penelitian dari Restu Rahayu, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana Kurikulum Merdeka diterapkan di sekolah penggerak. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah penggerak masih tidak stabil dan memerlukan evaluasi yang beragam.²³ Meskipun berkesinambungan dengan penelitian peneliti yang menganalisis Kurikulum Merdeka. Namun, penekanan penelitian ini lebih berfokus hanya pada penerapan Kurikulum Merdeka, sedangkan penelitian peneliti lebih rinci dalam menguraikan penerapan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

G. Sistematika Penulisan

Agar tulisan ini lebih mudah dipahami, konten pembahasannya dibagi menjadi beberapa bab dan subbab yang secara berkesinambungan membentuk satu rangkaian yang terstruktur. Sistematika pembahasan tersebut mencakup:

²² Siti Nur Afifah, Problematika Penerapan Kurikulum Merdeka dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP al-Falah Deltasari Sidoarjo. Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022, h. 94.

²³ Restu Rahayu dkk., "Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak," *Jurnal Basicedu* 6, no. 4 (22 Mei 2022): h. 6317, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3237>.

1. BAB I: Pendahuluan, secara lengkap mencakup latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.
2. BAB II: Kajian Teori dan Kerangka Pikir, membahas kajian teori dan kerangka pikir.
3. BAB III: Metodologi penelitian, mencakup jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, hingga prosedur penelitian.
4. BAB IV: Laporan hasil penelitian, memberikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, sampai pada analisis data.
5. BAB V: Penutup, berisikan kesimpulan dan saran-saran, hingga mencakup juga daftar pustaka, lampiran-lampiran sampai riwayat hidup dari penulis.